

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah jujur, luas dan bertanggungjawab adalah opsi yang digunakan oleh sistem pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan komunitas di seluruh negeri sebagai dari tuntutan reformasi. Adanya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat memberikan kesempatan sekaligus keleluasaan kepada daerah di Indonesia untuk mengembangkan, dan menetapkan strategi dalam memanfaatkan potensi yang tepat, efektif bagi masyarakat di daerah (Henri, 2020). Pada penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan perencanaan dan pembangunan yang tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan yang direncanakan.

Pembangunan yang efektif dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang partisipatif agar dapat mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif. Setiap program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Ini karena masyarakatlah yang mengetahui masalah dan kebutuhan dalam pembangunan di wilayahnya, dan mereka jugalah yang nantinya akan memafaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan di wilayah mereka.

Salah satu aspek penting tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejalan dengan pendapat conyers, 1991 dalam (Sigalingging & Warjio, 2019) mengemukakan 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting: Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut; Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah di manfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah yang melibatkan unsur perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah yang melibatkan unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan pusat semuanya berpartisipasi dalam hal ini.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum utama yang mempertemukan para pemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah. Forum ini di laksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Melalui musrenbang, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. Pendekatan *top-down* dan partisipatif dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (Musrenbangdes), kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), sebuah proses perencanaan pembangunan, adalah wahana publik yang penting untuk membawa pemangku kepentingan daerah untuk memahami masalah dan masalah yang ada. Tujuan dari wahana publik ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan solusi untuk berbagai masalah pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) juga merupakan tempat untuk mengsinkronisasikan pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom up*” untuk penilaian masyarakat dan penilaian teknis. Ini juga merupakan tempat untuk menyelesaikan konflik antara kepentingan pembangunan daerah dari pihak pemerintah dan non-pemerintah, serta antara

kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan. Ini juga merupakan tempat untuk mengsinergikan berbagai sumber penilaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapri, 2019, mengatakan bahwa fenomena yang sering terjadi adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran tidak maksimal, sehingga ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah, masyarakat dihadapkan oleh acara seremonial Musrenbang dimana masukan-masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk dokumen-dokumen kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, setelah itu masyarakat hanya cenderung mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada pemerintah kelurahan atau desa dan kecamatan. Masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan dalam prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sangat jauh berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Kelurahan Fatululi merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 9.333 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 9.120 jiwa. Total penduduk di kelurahan Fatululi adalah 18.453 jiwa. Dalam pelaksanaan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat sangat rendah dimana forum perencanaan pembangunan ini cenderung hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan saja. Berbagai permasalahan tersebut telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di

Kelurahan Fatululi. Program-program pembangunan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan distribusi pembangunan menjadi tidak merata di seluruh wilayah kelurahan. Hal ini mengakibatkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, yang tercermin dari minimnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 1.1
Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan Fatululi Tahun 2025

Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi
Fisik	1. Rehap gendung kantor lurah	Rehap gedung kantor lurah	Fatululi
	2. Pembangunan jalan setapak	Pembangunan jalan setapak	
	3. Pembangunan jalan hotmix	Pembangunan jalan hotmix	
	4. Pembangunan jalan lingkungan (Lapen)	Pembangunan jalan lingkungan (Lapen)	
	5. Lampu jalan	Lampu jalan	
	Lampu hias	Lampu hias	
	6. Saluran air	Saluran air	
	7. Lubang peresapan	Lubang peresapan	
	Drainase	Drainase	
	8. Papan nama jalan	Papan nama jalan	
Sosial	9. Kereta sampah	Kereta sampah	Fatululi
	10. Rabat jalan	Rabat jalan	
Kesehatan	1. Bedah rumah	Bedah rumah	Fatululi
	2. Gangguan jiwa	Gangguan jiwa	
Kesehatan	1. Foging	Foging	Fatululi

Sumber: Kantor Kelurahan Fatululi

Setiap tahun, masyarakat Kelurahan Fatululi mengajukan usulan yang hampir sama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 1.1 Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Musrenbang Tahun 2025, sebagian besar usulan berfokus pada infrastruktur fisik seperti rehab gedung kantor lurah, pembangunan jalan setapak, pemasangan lampu jalan, serta drainase, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar menjadi perhatian utama. Konsisten usulan yang berulang ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam realisasi program, alokasi anggaran, serta kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Jika kondisi ini terus terjadi, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat menurun akibat rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas proses perencanaan. Dan juga anggaran yang disediakan belum optimal sehingga yang hadir saat musrenbang hanya orang-orang perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam perencanaan, transparansi dalam realisasi program, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi warga dapat diwujudkan secara nyata.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Manik, Adam, & Isnaini, 2022) yang melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Padang Bolak”, dengan tujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan kendalanya dalam partisipasi masyarakat dalam musrenbang di kabupaten Padang bolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaran Musrebang di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilakukan setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaanya, kehadiran dan partisipasi masyarakat dinilai masih sangat kurang. Selanjutnya, terdapat rasa kecewa yang diutarakan

masyarakat atas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan sangat kurang, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan di Padang Bolak hanya sebagai formalitas. Kendala dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Padang Bolak yakni kurangnya kejelasan dalam komunikasi dan sosialisasi terkait Musrenbang, sumber daya manusia yang belum mumpuni, terbatasnya anggaran dan kewenangan, dan minimnya insentif kepada penyelenggara musrenbang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fakhira & Salam, 2023) dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan” dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama yaitu terdapat forum musrenbang untuk menampung usulan dari masyarakat, namun karena waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif dan efisien sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir. Pada indikator kedua kemampuan masyarakat terlibat dalam kegiatan musrenbang yaitu pada tahap partisipasi dan pada tahap perencanaan pembangunan serta pemberdayaan hanya sebatas unsur pelaksana saja sedangkan untuk pembuatan keputusan hanya berasal dari pemerintah dan organisasi terkait dan pada hal ini masyarakat menganggap musrenbang hanya sebagai formalitas saja. Lalu pada indikator ketiga masyarakat sudah menyampaikan pendapat mereka dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak- pihak yang terlibat maupun melalui perwakilan.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Fatululi Kota Kupang**” dengan tujuan untuk fokus menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Fatululi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi partisipasi masyarakat, diharapkan peneliti dapat kepentingan dalam meningkatkan efektivitas Musrenbang di tingkat kelurahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi?
2. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi?
3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi?
4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi.
4. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Fatululi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian akademik mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.